



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan oleh : Abdul Hakim Bafagih
Nomor Anggota : A-506
Daerah Pemilihan : Jawa Timur VIII

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati
Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri Paripurna pada hari ini, dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Fraksi PAN juga mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-76. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang *gemah ripah loh jinawi, baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Indonesia Amanah. Dan kita berdoa semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19. *Aamiin*.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Yang Kami Hormati

BKF (PKEM, PKAPBN)
DJA (SD1)

Fraksi PAN melihat bahwa Nota Keuangan dan RAPBN 2022 disusun oleh pemerintah dengan sebuah asumsi dasar yang sangat vital, tapi tidak dinyatakan secara tegas dan eksplisit. Asumsi vital tersebut adalah bahwa pemerintah optimis *herd immunity* atau kekebalan komunal akan tercapai sebelum tahun 2022 sehingga pandemi teratasi sejak awal 2022.

Terkait hal ini Fraksi PAN mengingatkan bahwa meski jumlah kasus harian COVID-19 menunjukkan tren penurunan di bulan Agustus 2021, jika dilihat dari “status transmisi”nya, Indonesia masih berada dalam transisi dari zona merah menuju zona kuning pandemi. Ini adalah evaluasi Fraksi PAN berdasarkan “status transmisi” sesuai ilmu kesehatan publik dan ekonomi kesehatan. Sebagai misal, pada tanggal 16 Agustus 2021 elastisitas produksi kesehatan kasus harian COVID-19 masih sebesar 3,24. Memang jauh menurun dibanding puncaknya yang sebesar 9,61 pada tanggal 16 Juli 2021. Namun elastisitas yang lebih besar dari satu (>1.0) itu menunjukkan status transmisi yang masih tinggi, yang membutuhkan pembatasan sosial selama *herd immunity* atau kekebalan komunal belum tercapai.

BKF (PKEM, PKAPBN)
DJA (SD1)

Di sisi lain, Fraksi PAN melihat bahwa perkembangan vaksinasi di Indonesia masih relatif lambat. Per tanggal 16 Agustus 2021, jumlah penduduk Indonesia yang sudah menerima minimal sekali suntikan vaksin adalah 55,1 juta. Namun jumlah penduduk yang sudah divaksin penuh baru 29,19 juta atau 10,8% dari populasi. Ini masih jauh di bawah rata-rata dunia yang sebesar 23,8% pada tanggal yang sama. Padahal, program vaksinasi ini sudah berjalan sejak 13 Januari 2021, atau sudah 7 bulan lebih. Di sisi lain Kementerian Keuangan kemarin (18/8) menyatakan menargetkan 70% penduduk sudah tervaksinasi pada akhir tahun 2021. Fraksi PAN menghitung, dengan target itu berarti kecepatan vaksinasi harus dinaikan 8,5 kali lipat dari kinerja selama periode 13 Januari – 16 Agustus 2021.

BKF (PKEM)
DJA (Dit Abid PMK
SD2)

Itu sebabnya Fraksi PAN mengingatkan agar pemerintah secara ketat memonitor dua variabel: (1) status transmisi COVID-19, dan (2) cakupan vaksinasi penuh. Pemerintah perlu memastikan bahwa status transmisi berada pada level rendah dan cakupan vaksinasi mencapai level kekebalan komunal. Jika kedua hal ini belum tercapai per 1 Januari 2022, Fraksi PAN menyarankan pemerintah memasukkan skenario di mana asumsi ekonomi dan rencana program dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022 disesuaikan dengan capaian dari kedua variabel tersebut.

DJA (SD2, SD3
Dit. Abid)

Fraksi PAN memberi dukungan penuh kepada pemerintah untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran secara fleksibel dan cepat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan tujuan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hadirnya undang-undang tersebut harus digunakan secara bijaksana dan bertanggungjawab. Fraksi PAN menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan undang-undang tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya dan berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah menjadi komitmen Pemerintah dan DPR.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Yang Kami Hormati

Setelah memperhatikan pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo secara seksama tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022, maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Fraksi PAN menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,0% – 5.5% hanya bisa tercapai jika status transmisi COVID-19 rendah dan kekebalan komunal tercapai. Jika kedua hal ini tidak tercapai, maka perkiraan pertumbuhan tersebut terlalu optimis, bahkan kurang realistis. Ada beberapa hal yang harus diingat pemerintah, di antaranya: *pertama*, ketidakpastian akibat pandemi covid-19 masih tinggi. Angka terpapar dan angka kematian covid-19 hingga pertengahan Agustus 2021 masih tinggi. Cakupan vaksinasi penuh masih rendah, jauh di bawah rata-rata dunia. Fraksi PAN mengapresiasi pada kuartal kedua 2021 angka pertumbuhan kita sangat tinggi 7.07%. Namun tak lama kemudian Pemerintah memberlakukan PPKM darurat, sehingga bisa kita perkirakan pertumbuhan semester ketiga tidak akan setinggi semester kedua.

Kedua, masih belum bergeraknya sektor manufaktur dan komersial akibat PPKM. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manufaktur merupakan salah satu kontributor bagi pertumbuhan ekonomi, namun ‘mati suri’ sejak PPKM darurat diberlakukan hingga sekarang. *Ketiga*, butuh dukungan pemulihan di sektor konsumsi, investasi dan ekspor secara bersamaan.

Jika status transmisi dan cakupan vaksinasi tidak membaik dengan signifikan, Fraksi PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2022 berada pada kisaran 4.0 %. Pandangan Fraksi PAN ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya meredam penyebaran Covid 19 dan mempercepat proses vaksinasi, mendongkrak daya beli masyarakat, meningkatnya permintaan dari pasar tujuan ekspor, *recovery* dari rantai pasok global, dan tantangan lainnya yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tinggi.

Mengingat banyaknya variable di atas yang berada di luar kontrol pemerintah, Fraksi PAN mengusulkan agar Pemerintah menuntaskan penanganan covid-19 di antaranya melalui vaksinasi, jaring pengaman sosial, dan lainnya. Penanganan covid-19 ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan pengawasan yang sangat ketat, agar tidak ada ruang praktik korupsi. Selanjutnya Fraksi PAN juga mendorong agar belanja pemerintah bisa lebih dioptimalkan dan penyerapan anggaran bisa dipercepat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkat sedini mungkin. Apalagi diketahui bahwa

BKF (PKEM)
DJA (SD1)

BKF (PKEM)
DJA (SD1)

belanja pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Kami juga tegaskan kembali agar seluruh bantuan sembako yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

- **Penerimaan Perpajakan**

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2022 tumbuh sebesar Rp1.506,9 triliun. Keberadaan pajak sangat vital bagi penerimaan negara, namun selama ini penerimaan pajak terbukti selalu di bawah target. Pertumbuhan penerimaan pajak selama 2014 – 2020 rata-rata tumbuh 2,9% per tahun. Bahkan pertumbuhan perpajakan tahun 2019 (sebelum pandemi) hanya tumbuh 1,8%. Pemasukan pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah baik dari badan maupun individu relatif tinggi. Ini seperti buah simalakama pemerintah ingin menggenjot ekonomi, yang berimplikasi pada penerimaan pajak yang akan tinggi, tapi disisi lain sektor-sektor perekonomian kita masih belum pulih. Fraksi PAN menyarankan Kementerian Keuangan jangan hanya *business as usual* dalam menggenjot penerimaan negara, dan perlu lebih kreatif mengejar penerimaan negara memanfaatkan teknologi informasi dan informasi intelijen.

- **Reformasi Struktural**

Fraksi PAN meminta agar reformasi struktural jangan hanya mengandalkan pajak dari masyarakat, tapi juga dari BUMN. BUMN harus memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendorong agenda-agenda reformasi struktural yang diusung pemerintah. Pemerintah sudah seharusnya menagih deviden dari BUMN. Selama pandemi BUMN telah mendapatkan bantuan Penyerahan Modal Negara (PMN) yang sangat besar dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah seharusnya bisa terefleksikan pada kinerja BUMN, dalam bentuk kontribusi nyata melalui deviden untuk APBN. Namun yang terjadi justru sebaliknya, BUMN terus merugi. Share Kekayaan Negara (SKN) yang dipisahkan terhadap PNBPN sejak 2019 sebesar 19,74 persen, di tahun 2020 sebesar 22,10 persen, dan di tahun 2021 sebesar 8,90 persen. BUMN harus menjadi bagian penting dari reformasi struktural.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp333,2 triliun. Fraksi PAN meminta agar penetapan target ini harus didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan PNBP seperti PNBP SDA, dividen BUMN, PNBP pada Kementerian/Lembaga, dan PNBP pada BLU. Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah dapat segera menjalankan mandat Undang-Undang PNBP yang baru. Maka dari itu, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan peraturan turunan atas undang-undang tersebut sehingga rencana kerja atas PNBP dapat tergambar pada tahun mendatang.

- **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

BKF (PKAPBN)
DJP
DJA (SD1)

Kemen. BUMN
BKF (PKAPBN)
DJKN
DJA
- SD5, SD2
- Dit. PNBP SDA KND

DJA
- Dit. PNBP SDA KND
- Dit. PNBP KL
- (SD1)
- DJPB (Dit. PKBLU)

Target alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 sebesar Rp321,2 T atau turun sebesar 56 persen dari tahun 2021 sebesar Rp744,45 triliun. Fraksi PAN memandang stimulus PEN ini sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan pada tahun depan. Meskipun alokasi PEN 2022 lebih rendah, tetapi Fraksi PAN meminta Pemerintah agar segera memastikan serapan PEN lebih maksimal mengingat saat ini penyerapan PEN baru mencapai 43 persen atau setara 320,3 triliun dari total pagu PEN per Agustus 2021. Fraksi PAN mendorong agar realisasi PEN mengutamakan pada bidang Kesehatan, yang saat ini sudah terealisasi sebesar 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu sebesar 214,96 triliun. Anggaran tersebut harus digunakan untuk kepentingan 3T (testing, tracing, treatment), insentif nakes, pengadaan vaksin, insentif pada Kesehatan, dan lain-lain. Juga perlu mendorong realisasi klaster perlindungan sosial yang saat ini sudah mencapai 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu sebesar 186,64 triliun, di mana anggaran tersebut digunakan untuk program bantuan sosial, bantuan subsidi upah, dan lain-lain, yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan tepat sasaran. Untuk optimalisasi pencapaian, Fraksi PAN mendorong agar dilakukan akurasi data.

- Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Fraksi PAN mengapresiasi program perlinsos yang dijalankan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam RAPBN 2022, pemerintah merencanakan perlinsos melalui belanja K/L pemerintah pusat berupa: (1) Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM, sebesar Rp28.709,8 miliar; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp45.120,0 miliar; (3) Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp11.113,8 miliar; (4) Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9.662,6 miliar; dan (5) bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp46.464,0 miliar. Perlinsos melalui belanja non-K/L pemerintah pusat: (1) Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp56.479,9 miliar; (2) Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp66.254,5 miliar; (3) Program Kartu Prakerja, sebesar Rp11.000,0 miliar; (4) penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23.100,0 miliar; dan (5) dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja. Selain melalui Belanja Pemerintah Pusat, dukungan anggaran perlindungan sosial melalui TKDD diberikan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp27.200,0 miliar.

Namun Fraksi PAN secara khusus mengingatkan Presiden bahwa anggaran Perlinsos itu sangat rentan KKN, sangat berisiko tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Karena itu, Fraksi PAN menyarankan agar Presiden mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menjamin dana Perlinsos 2022 sebesar Rp 427,5 triliun

benar-benar tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat manfaat. Fraksi PAN juga menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana pengurangan anggaran Perlinsos 2022 sebesar Rp 60,3 triliun, khususnya jika status transmisi dan cakupan vaksinasi tidak sesuai harapan.

- **Belanja Pemerintah Pusat**

Belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.938,3 triliun, atau lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 1.951,3 triliun. Fraksi PAN memahami telah terjadi penurunan belanja modal pemerintah. Namun demikian, Pemerintah harus tetap mengoptimalkan belanja modal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat. Sebab, realisasi belanja modal dari tahun ke tahun memperlihatkan serapan yang minim. Menurut laporan Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara baru mencapai 2.306,71 triliun atau 84,2 persen. Fraksi PAN berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan belanja modal di pemerintah pusat yang notabene sangat penting sekali untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi saat ini.

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp770,4 triliun, atau turun dari sebelumnya sebesar 796,3 triliun pada tahun 2021. Meskipun terjadi pengurangan belanja transfer ke daerah dan dana desa tersebut, Fraksi PAN meminta agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dan mengarahkan pemanfaatan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk pemulihan kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan vaksinasi masyarakat. Fraksi PAN juga mendorong agar dana desa dapat difokuskan untuk beberapa program prioritas seperti padat karya tunai, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan peningkatan peran BUMDesa.

- **Penurunan Angka Kemiskinan**

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 10,19 persen menjadi 8,5 persen. Fraksi PAN menilai, target tersebut cukup realistis jika pandemi sudah terkendali dan roda perekonomian dapat berjalan normal, baik dunia usaha maupun konsumsi. Data BPS pada Maret 2021 menunjukkan, angka kemiskinan masih sebesar 10,19 persen atau 27,54 juta orang. Untuk menurunkan angka tersebut, ada hambatan yang sangat jelas yaitu kemiskinan yang tersebar di berbagai daerah. Untuk mengatasi kemiskinan yang tersebar itu, maka diperlukan komitmen yang kuat dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setiap daerah memiliki problematika yang berbeda. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini, pemulihan belum tentu bisa dilakukan secara merata di semua daerah. Bagi daerah-daerah yang sudah berhasil melakukan vaksinasi secara massif dan merata di

DJA
- SD2, SD3, SD4

DJPK
DJA
- SD4

Bappenas,
BKF (PKEM)
DJA
- SD1

daerahnya, aktivitas ekonomi sudah tentu bisa mulai dilakukan secara normal. Diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah bisa pulih, sehingga APBD kembali normal dan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Tetapi bagi daerah-daerah, khususnya daerah luar Jawa yang masih mengalami lonjakan covid, tentu belum dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, sehingga belum dapat menurunkan angka kemiskinan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati

Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PAN atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PAN setuju atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, Fraksi PAN meminta seluruh masukan dan catatan yang diberikan kepada Pemerintah agar menjadi perhatian yang dapat ditindaklanjuti secara serius.

*Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 19 Agustus 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris